**ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM** **MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN** **TRENGGALEK TAHUN 2013-2015**

**Oleh:**

**Nimas Agustin Candra Sujarwo,**

**Abdul Wahid Mahsuni dan**

**M. Cholid Mawardi**

**Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi**

**Universitas Islam Malang**

[**Nimas17agustin@gmail.co**](mailto:Nimas17agustin@gmail.com)**m**

***ABSTRACT***

*This research is conducted in Trenggalek Regency because of the potential of natural resources in Trenggalek which is so big especially in terms of tourism and agrarian sector. With the existence of regional autonomy should this sector can be developed optimally as one of source of original revenue area. Trenggalek is very interesting to investigate after the new policy about the government that is regional autonomy which gives opportunity to local government to more optimize the potential of natural resources that exist. In addition, the lack of research on the evaluation of existing development in this regency after the regional autonomy is one of the lack of reference in the development of this regency, so it is expected that this research can be considered by the local government of Trenggalek Regency in developing the economy and also determine the development targets to increase people welfare.*

*Given the economic problems in the Trenggalek area with a lot of local revenue sources we can see whether the Trenggalek Regency government has been able to optimize every available source of income to accelerate or support the implementation of regional autonomy. By using sample of financial report of Regency of Trenggalek year 2013-2015, with result of research as a whole result of calculation of Independence Ratio, Effectiveness, Efficiency, and Activity got result that Trenggalek Regency not support implementation of Regional Autonomy.*

***Keywords: regional financial capacity in supporting the implementation of regional autonom***

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah sangat penting untuk kesejahteraan rakyat. Perkembangansuatu daerah tergantung bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan potensi dan kekayaanyang ada pada daerah tersebut. Menurut Mardiasmo (2002:96), Otonomi dan Desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan local bangsa Indonesia berupa ancaman Disintregisasi, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia.

Dari hal tersebut utamanya setelah reformasi dan awal dibentuknya Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui melalui ditetapkannya Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan system pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Dengan adanya permasalahan perekonomian didaerah Trenggalek yang cukup banyak sumber-sumber pendapatan daerahnya kita dapat melihat apakah pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah mampu mengoptimalkan tiap-tiap sumber pendapatan yang ada untuk mempercepat atau mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Trenggalek karena melihat dari potensi sumber daya alam yang ada di Trenggalek yang begitu besar terutama dari segi pariwisata dan sektor agraris. Dengan adanya otonomi daerah seharusnya sektor ini dapat dikembangkan secara optimal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis** **Perkembangan Kemampuan Keungan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2013-2015”**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Otonomi Daerah**

Susilo dan Hariadi, 2007 berpendapat bahwa, Otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat

5, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian itu, dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan kemerdekaan atau kebebasan menentukan aturan sendiri berdasarkan perundang-undangan, dalam memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

**Tujuan Kebijakan Otonomi Derah**

Menurut pendapat Mariun dalam Kaho (2001:9), tujuan dianutnya desentralisasi dalam Otonomi daerah adalah:

1. Demi mencapai efektifitas pemerintah

2. Demi terlaksananya demokrasi dari bawah

**Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005).

**Kemampuan Keuangan Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewjiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Menurut Yuliati (2001:22), Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu berkaitan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar balanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Berdasar Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa struktur APBD terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

**Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Belanja Daerah**

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan adalah rasio. Erich Helfert (2000:49) mengartikan rasio adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan.

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Kabupaten Trenggalek. Sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yakni teknik pengumpulan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu.

**Metode Pengumpulan Data**

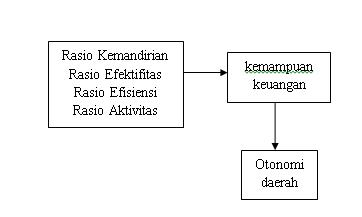
Data yang di analisis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2015, laporan PAD Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2015, laporan Keuangan Kabupaten Trenggalek tahun 2013-2015

**Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif dan Analisis Kualitatif.

**Model Analisis**

1. Gambar 2.1 Model Analisis



**MODEL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**Indek Kemampuan Rutin**

Berdasarkan rasio indeks kemampuan rutin daerah menunjukan bahwa pemerintah daerah

Kabupaten Trenggalek Pada tahun 2013 dilihat dari PAD sebesar Rp77.799.518.146,11 dan pengeluaran rutin sebesar Rp. 7.000.000.000,00 pertumbuhanya 11.11%, kemudian pada 2014 dan 2015 rasio indeks kemampuan rutin mencapai 16,62 % dari PAD sebesar Rp.132.951.069.311,87 dan pengeluaran rutin sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dan 36,81 % dari PAD 155.254.334.898,82 serta dari pengeluaran rutin sebesar Rp. 4.000.000.000,00.. Ini menunjukan bahwa kemandirian keuangan Kabupaten Trenggalek dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin selama tahun 2013-2015 masih kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 20,01% - 40,00%.

**Pembahaan**

**Rasio Kemandirian**

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah

Tabel 4.2

Tren perkembangan kemandirian kabupaten Trenggalek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Tingkat Kemandirian | X | XY | X2 |  |
| (Y) | (tahun) |  |
|  |  |  |  |
| 2013 | 6.89% | -1 | -0.06892 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 9.74% | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 11.17% | 1 | 0.111694 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Total | 27.80 | 0 | 0.042776 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Sumber: Hasil Pengolahan 2017

Nilai a dan b di cari dengan rumus:

a = ∑Y = 27.80 = 0.092661015

3 3

b = ∑XY = 0.042776 = 0.021388204 Y2 2

Diketahui bahwa Y’= 0.92661015+0.021388204 Y’= 0.947998354

Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Trenggalek selama tiga tahun anggaran (2013-2015) berkisar antara 6.89% sampai dengan 11.17%. Secara konsepsional tingkat kemandirian Kabupaten Trenggalek sangat rendah, karena memiliki pola hubungan instruktif.

Gambar 4.2

Grafik Trend Perkembangan Kemandirian Kabupaten Trenggalek

Sumber: Hasil pengolahan 2017

**Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Tabel 4.4

Tren Perkembangan Efektifitas Kabupaten Trenggalek

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Tingkat Efetivitas (Y) | X | XY | X2 |
|  |  | (tahun) |  |  |
| 2013 | 14.52118204 | -1 | -14.521182 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| 2014 | 12.50539236 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| 2015 | 11.20112707 | 1 | 11.2011271 | 1 |
|  |  |  |  |  |
| Total | 38.22771047 | 0 | -3.320055 | 2 |
|  |  |  |  |  |

Sumber: Hasil pengolahan 2017

Nilai a dan b di cari dengan rumus:

a = ∑Y = 38.23% = 12.74256716

n 3

b = ∑XY = -3.320055 = -1.660027485 Y2 2

Diketahui bahwa Y’= 12.74256716+-1.660027485 Y’= 11.08253967

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2013-2015 berkisar antara 14,52 % sampai dengan 11,20%. Hal itu menunjukkan bahwa selama lima tahun anggaran (20013-2015) pemungutan Pendapatan Asli Daerah tidak efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ditetapkan berkisar di angka 100%.

Gambar 4.3

Grafik Trend Perkembangan Efektivitas Kabupaten Trenggalek

Sumber: Hasil pengolahan 2017

**Rasio Efisiensi**

Rasio efektifitas membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD.

Tabel 4.6

Trend Perkembangan Efisiensi Kabupaten Trenggalek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Tingkat Efisiensi (Y) | X | XY | X2 |  |
| (tahun) |  |
|  |  |  |  |  |
| 2013 | 0.08 | -1 | -0.08 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0.18 | 1 | 0.18 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Total | 0.35 | 0 | 0.1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Sumber: Hasil Penelitian 2017

Nilai a dan b di cari dengan rumus:

a = ∑Y = 35% = 0.116666667

n 3

b = ∑XY = 0.1 = 0.05 Y2 2

Diketahui bahwa Y’= 0.116666667+0.05 Y’= 0.166667

Rasio efisiensi keuangan di Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2013-2015

berkisar antara 8% sampai dengan 18%. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah

daerah dalam merealisasikan pengeluarannya tidak efisien.

Gambar 4.4

Grafik Trend Perkembangan Efisiensi Kabupaten Trenggalek

Sumber: Hasil penelitian 2017

**Rasio Aktifitas**

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pememerintah daerah memprioritaskan alokasi

dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Tabel 4.8

Trend Perkembangan Aktivitas Kabupaten Trenggalek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Tingkat Aktivitas | X | XY | X2 |  |
| (tahun) |  |
|  |  |  |  |  |
| 2013 | 0.96537095 | -1 | -0.965371 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 1.208805358 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 0.993038687 | 1 | 0.99303869 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Total | 3.167215 | 0 | 0.02766774 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Sumber: Hasil Pengolahan 2017

Nilai a dan b di cari dengan rumus:

a = ∑Y = 3.167215 = 1.055738332

n 3

b = ∑XY = 0.02766774 = 0.013833869 Y2 2

Diketahui bahwa Y’= 1.055738332+0.013833869 Y’= 1.069572

Gambar 4.5

Grafik Trend Perkembangan Aktivitas Kabupaten Trenggalek

Sumber: Hasil penelitian 2017

Grafik 4.5 menunjukkan bahwa alokasi dana dari tahun ke tahun selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir Rasio Aktivitas Kabupaten Trenggalek belum diprioritaskan untuk Belanja Rutin

**KESIMPULAN**

**Simpulan**

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Trenggalek tahun anggaran 2013-2015 dengan hasil tingkat rata” sebesar 27.80%, menggambarkan kinerja masih sangat rendah sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah.
2. Rasio Efektivitas Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerah pada tahun 2013-2015 dengan perolehan rata-rata efektivitas pendapatan daerah tahun anggaran 2013-2015 sebesar 38.23% sesuai dengan kriteria penilaian efektifitas yang kurang efektif. Maka pemerintah daerah harus meningkatkan *output* (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintah daerah yang lebih baik.
3. Rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2013-2015 cukup efisiensi dari belanja daerah Kabupaten Trenggalek memiliki kecenderungan cukup efisien dengan tingkat efisiensi di bawah 100% yaitu 0.38%.
4. Rasio Aktivitas Kabupaten Trenggalek di lihat dari belanja rutin yang paling tinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1.21% dan yang paling rendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 0.97%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir Rasio Aktivitas Kabupaten Trenggalek belum diprioritaskan untuk belanja rutin.

**Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan 3 tahun yaitu 2013 samapai dengan 2015, sehingga diharapkan pada peneliti selanjutnya akan menambahkan laporan keuangan lebih dari tiga tahun guna memperkuat hasil penelitian.
2. Data yang dianalisis dlama penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran daerah, dimana pada data tersebut terdapata beberapa nilai yang masih sementara sehingga penggunaan data-data tersebut belum sepenuhnya memperlihatkan kenyataan yang sebenarnya.

**Saran**

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggaelek sebaiknya mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana ekstern atau bantuan pemerintha pusat dan provinsi dengan cara mengelola pemungutan pendapatan asli daerah secara spesifik, yaitu dengan memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang menjadi sumber yang dapat meningkatkan PAD, sehingga potensi yang ada bisa di kelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Kabupaten Trenggalek harus mengurangi pengalokasian belanja pembangunan, sehingga pembangunan yang belum terealisasi bisa terwujud.

**Daftar Pustaka**

Bambang Supomo dan Nur Indriantoro. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedua.Yogyakara: Penerbit BFEE UGM

Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2002.. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*. Edisi Pertama. Jalarta: Salemba Empa.

Halim, Abdul. 2008. *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jakarta: UUP STIM. Haris, Syamsuddin (2005). *Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Jakarta: LIPI Press

Helfert, Erich A. 2000. *Technics of Financial Analysis : A Guide to Value Creation, 10thEdition.*

Singapore : McGraw-Hill Book Co.

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Unit Penerbit Dan Percetakan PN

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Bisnis & Ekonomi Edisi 3*. Jakarta: Erlangga

Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tamboto, L. Morasa, J dan Mawikere, L. 2014..*Analisis kemampuan keuangan daerah dalam* *masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara***.**Jurnal EMBA.2 (2), 755-767

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Andi Offset Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Nataluddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan pada Pemerintahan Daerah di Propinsi Jambi,*

*Manajemen Keuangan Daerah.* Yogjakarta. UPP YKPN.

Nanang, R. 2008. *Otonomi daerah Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif keuangan* *daerah*.Universitas Islam Malang: tidak diterbitkan

Nadeak, K. 2003. UU Otda dan Desentralisasi Korupsi. Diakses dari  [http://www.sinarharapa](http://www.sinarharapan/)n.co.id/berita/0306/14/opio2.html

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah RI No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang *STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Salemba Empat

Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang* *Tahun Anggaran 2007-2011*. Malang: Universitas Brawijaya Malang.

Rasyid, Ryaas. 2007. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah*

*Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran?*. SNA, 10, 26-28 Juli 2007.

Susiani, I. 2008.. *Analisis kemampuan keuangan daerah sesudah otonomi daerah (studi empiris* *pada Kota dan kabipaten di Jawa timur).* Skirpsi, Tidak Dipublikasikan, Universitas IslamMalang

Sumarjo Hendro. 2010.*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja*

*KeuanganPemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*.Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sularso (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan* *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*.

Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum* *Dan Sesudah Otonomi (Studi Empiris Di Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi PenelitianAkuntansi Dan Keuangan Sektor Publik Pertama, 25-26 April

Sonny Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan* *Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: BayumediaPublishing 2007.

Tumilar, R.L.H. 1997. *Otonomi Keuangan dan Ekonomi Dati II di Propinsi Sulawesi Utara*. Tesis S-2, PPS-UGM,.Yogyakarta (Tidak dipublikasikan).

Tika, H. Moh. Pabundu. 2006. *Budaya organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara

*Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal

Otonomi Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Windiyanti, L. 2004. *Analisis kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi*

*Daerah Pada Kabupaten Malang,* Skripsi, Tidak Dipublikasikan: Universitas Islam Malang.Wulandari, Anita. 2001. Kemampuan Keuangan Daerah. *Dalam Jurnal Kebijakan dan*

*Administrasi Publik Vol.5 No. 2. November*

Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan pada APBD Boyolali, Manajemen Keuangan Daerah.*

Yogjakarta. UPP YKPN

Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah,* *Manajemen Keuangan Daerah.* Yogjakarta. UPP YKPN.

**Lampiran 1. Rasio Kemampuan Keuangan**

Tabel 4.2 Rasio Kemandirian

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Pendapatan Asli** | **Pendapatan Transfer** | **Pendapatan Lain-lain** | **Rasio** |
|  | **Daerah** | **Dana Perimbangan** | **Yang Sah** | **Kemandirian** |
| 2013 | 77,799,518,146.11 | 865,666,372,488.00 | 263,212,052,404.00 | 6.89% |
|  |  |  |  |  |
| 2014 | 132,951,069,311.87 | 940,434,481,091.00 | 424,964,818,958.00 | 9.74% |
|  |  |  |  |  |
| 2015 | 155,254,334,898.82 | 977,071,592,537.00 | 412,926,219,904.00 | 11.17% |
|  |  |  |  |  |

Tabel 4.5 Rasio Efektivitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Realisasi Penerimaan** | **Target Penerimaan** | **Rasio** |
|  | **PAD** | **PAD** | **Efektivitas PAD** |
| 2013 | 1,128,878,424,892.00 | 77,740,119,338.52 | 1452% |
|  |  |  |  |
| 2014 | 1,365,399,300,049.00 | 109,184,842,919.00 | 1251% |
|  |  |  |  |
| 2015 | 1,389,997,812,441.00 | 124,094,459,746.00 | 1120% |
|  |  |  |  |

Tabel 4.8 Rasio Efisiensi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Biaya Perolehan** | **Realisasi Penerimaan** | **Efisiensi** |
|  | **PAD** | **PAD** | **PAD** |
| 2013 | 91,778,968,541.01 | 1,128,878,424,892.00 | 8% |
|  |  |  |  |
| 2014 | 128,182,662,892.52 | 1,365,399,300,049.00 | 9% |
|  |  |  |  |
| 2015 | 249,375,811,875.99 | 1,389,997,812,441.00 | 18% |
|  |  |  |  |

Tabel 4.11 Rasio Aktivitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Total Belanja Rutin** | **Total APBD** | **Rasio Aktivitas** |
|  |  |  |  |
| 2013 | 1,164,834,490,081.60 | 1,206,618,544,230.75 | 97% |
|  |  |  |  |
| 2014 | 1,372,622,453,135.40 | 1,135,519,828,408.00 | 121% |
|  |  |  |  |
| 2015 | 1,552,970,281,991.22 | 1,563,856,777,789.00 | 99% |
|  |  |  |  |

**Lampiran 2. Trend Perkembangan Kemampuan Keuangan**

Tabel 4.3 Tren perkembangan kemandirian kabupaten Trenggalek

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Tingkat Kemandirian | X | XY | X2 |  |
| (Y) | (tahun) |  |
|  |  |  |  |
| 2013 | 6.89% | -1 | -0.06892 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2014 | 9.74% | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2015 | 11.17% | 1 | 0.111694 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Total | 27.80 | 0 | 0.042776 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |

Tabel 4.6 Tren Perkembangan Efektifitas Kabupaten Trenggalek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | | |  | Tingkat Efetivitas (Y) | | |  | X | |  |  | XY | |  | X2 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (tahun) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 | | |  |  |  | 14.52118204 |  | -1 | |  | -14.521182 | | |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2014 | | |  |  |  | 12.50539236 |  | 0 | |  |  | 0 | |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2015 | | |  |  |  | 11.20112707 |  | 1 | |  | 11.2011271 | | |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Total | | |  |  |  | 38.22771047 |  | 0 | |  | -3.320055 | | |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |
| Tabel 4.9 Trend Perkembangan Efisiensi Kabupaten Trenggalek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tahun | | | | Tingkat Efisiensi (Y) | |  |  |  | X |  | XY | |  |  | X2 | |  |
|  |  |  |  | (tahun) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | | |  | 0.08 |  |  |  | -1 | |  | -0.08 | |  |  | 1 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | | |  | 0.09 |  |  |  | 0 | |  | 0 |  |  |  | 0 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | | |  | 0.18 |  |  |  | 1 | |  | 0.18 | |  |  | 1 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total | | | | 0.35 |  |  |  | 0 | |  | 0.1 | |  |  | 2 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Tabel 4.12 Trend Perkembangan Aktivitas Kabupaten Trenggalek | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tahun | |  |  | Tingkat Aktivitas | |  |  | X | |  | XY | |  |  | X2 | |  |
|  |  |  |  |  |  | (tahun) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2013 | |  |  |  | 0.96537095 |  |  |  | -1 |  | -0.965371 | | |  |  | 1 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | |  |  |  | 1.208805358 |  |  |  | 0 |  | 0 | |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  | 2015 | |  |  |  | 0.993038687 |  |  |  | 1 |  | 0.99303869 | | | |  | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |  |
|  |  | Total | |  |  | 3.167215 |  |  |  | 0 |  | 0.02766774 | | | |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |